SEKINCAU

SEKILAS KINERJA DAN CAPAIAN UTAMA KPPN LIWA

PERIODE
TRIWULAN
IV 2024

SEKINCAU

Sekincau (Sekilas Kinerja dan Capaian Utama) sebagai buku informasi yang disusun dan dipublikasikan secara berkala kepada para stakeholder secara triwulanan. Sekincau menyampaikan capaian kinerja KPPN Liwa yang utama dan bersifat strategis bagi para stakeholder untuk meningkatkan transparansi pengelolaan APBN KPPN Liwa.

DISUSUN OLEH :

Maria Lucky Ariana
Benie Habrian Iskandar
Ahmad Slamet Subchan
Dinda Larasati Damanik
Mitha Salsabila Oktaputri
Yudo Prayogi Irsad

FOTO DAN DATA :

Dokumentasi KPPN Liwa

Laporan Monev TKD Triwulan IV 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
REALISASI APBN	5
PNBP WILAYAH KERJA KPPN LIWA	9
SEKILAS INFO "DANAU SUOH"	11
TRANSFER KE DAERAH	13
LAPORAN INFLASI	17
ARTIKEL "PERAN GEN Z DI ERA SOCIETY 5.0"	25
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMI)	27
DOKUMENTASI KEGIATAN KPPN LIWA	29

"SEKINCAU" KPPN Liwa

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Sekilas Kinerja dan Capaian Utama "Sekincau" KPPN Liwa edisi Triwulan IV Tahun 2024 ini dapat kami selesaikan dengan baik. Tujuan penerbitan Sekincau KPPN Liwa ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran umum mengenai kinerja KPPN Liwa dalam penyaluran APBN periode Triwulan IV Tahun 2024 yang mencakup realisasi belanja pemerintah, perkembangan realisasi belanja, pagu belanja pemerintah lingkup Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, PNBP di wilayah kerja KPPN Liwa, penyaluran Transfer ke Daerah serta perkembangannya di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, kami akan terus berupaya membangun organisasi yang lebih baik dengan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai bagian dari Tranformasi Kelembagaan agar kepercayaan stakeholders khususnya, serta publik pada umumnya, semakin meningkat sesuai janji layanan kami yaitu pelayanan "TRUST"

KEPALA KPPN LIWA
MARIA LUCKY ARIANA

Transparan, Ramah, Utamakan Pelayanan, Sempurna, dan Tanpa Biaya. Harapan kami, edisi Sekincau ini dapat memberikan informasi yang tepat dan memadai sehingga dapat dijadikan salah satu sumber penerapan data-driven organization yang dapat mengantarkan pada peningkatan kinerja KPPN Liwa serta seluruh stakeholders, baik satuan kerja, pemerintah daerah, pihak perbankan, maupun masyarakat. Akhir pengantar, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyelesaikan penyusunan Sekincau KPPN Liwa ini.

SARASWATI

IRMAYANTI

DINDA

BANGKIT

LUCKY

SUBCHAN

OUR TEAM

SYAHIRA

BENIE

CITRA

YUDO

INDAH

MITHA

REALISASI BELANJA K/L

TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pelaksanaan realisasi belanja pemerintah Kementerian/Lembaga (K/L) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan kontribusi signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat. Dampak positif APBN terhadap perekonomian nasional antara lain mencakup stabilisasi perekonomian, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pendapatan yang dilakukan secara transparan dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa sebagai unit pelaksana penyaluran alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berkomitmen untuk mendukung peran tersebut melalui upaya peningkatan kualitas dan realisasi belanja, serta penguatan implementasi kebijakan penyaluran TKD Tahun Anggaran 2024.

Persentase **Realisasi Belanja** K/L sampai dengan Triwulan IV 2024

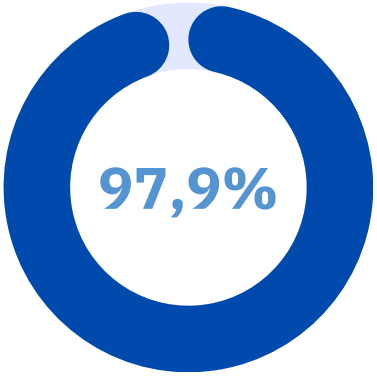

Total Pagu : 256.646.221.000

Total Realisasi : 251.288.349.982

Dalam hal ini, KPPN Liwa berperan sebagai pengawal keuangan negara di daerah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan.

Dengan demikian, pelaksanaan realisasi belanja pemerintah K/L yang dibiayai melalui APBN dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat, serta mendukung tercapainya tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan realisasi belanja, serta memperkuat implementasi kebijakan penyaluran TKD, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pagu dan Realisasi Belanja K/L sampai dengan Triwulan IV 2024

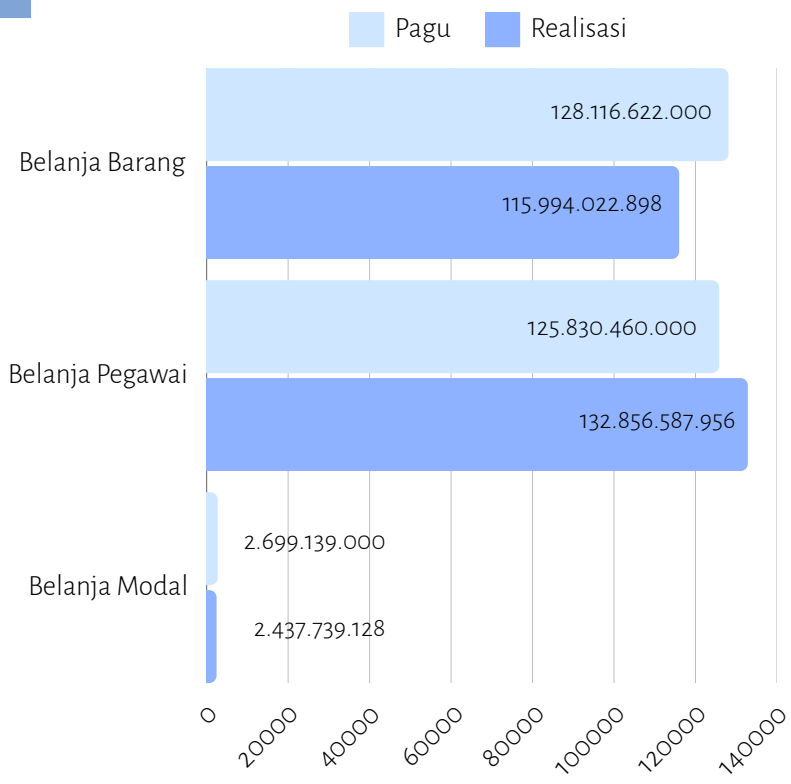

Tahun ini, total pagu anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp256.646.221.000. Namun, realisasi anggaran yang dicapai hanya sebesar Rp251.288.349.982, atau sekitar 97,9% dari total pagu.

Dari data di samping, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk seluruh jenis belanja belum mencapai 100% dari pagu yang disediakan. Namun, realisasi anggaran untuk Belanja Pegawai melebihi pagu yang disediakan, yaitu sebesar 105,6%.

Dalam rincian belanja, terdapat beberapa kategori yang memiliki realisasi di bawah target. Belanja Barang, misalnya, hanya mencapai realisasi sebesar Rp115.994.022.898, atau sekitar 90,5% dari pagu sebesar Rp128.116.622.000. Demikian pula dengan Belanja Modal, yang hanya mencapai realisasi sebesar Rp2.437.739.128, atau sekitar 90,3% dari pagu sebesar Rp2.699.139.000.

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp132.856.587.956, atau sekitar 105,6% dari pagu sebesar Rp125.830.460.000. Realisasi belanja pegawai yang melebihi pagu anggaran pada beberapa Satker menunjukkan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun hal ini menyebabkan pagu minus belanja pegawai, namun Satker telah segera mengambil tindakan untuk melakukan revisi pagu anggaran.

Revisi pagu anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas anggaran, serta akan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien.

Evaluasi Realisasi Belanja

1. **Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran:** Untuk meningkatkan realisasi belanja, perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan identifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan realisasi belanja belum mencapai target.
2. **Peningkatan kualitas perencanaan anggaran:** Perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan riil dan prioritas pembangunan.
3. **Penguatan pengawasan dan pengendalian:** Perlu dilakukan penguatan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan transparan.
4. **Peningkatan kapasitas aparatur:** Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan anggaran.

KOMPOSISI PAGU APBN KAB. LAMPUNG BARAT

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 realisasi anggaran pemerintah **Kabupaten Lampung Barat** mencapai Rp161.903.668.329,- atau sekitar 100,89% dari total pagu sebesar Rp160.472.388.000,-.

Realisasi per Jenis Belanja :

1. Belanja Barang: Realisasi sebesar Rp74.945.647.236,- atau sekitar 97,4% dari pagu sebesar Rp76.937.631.000,-. Ini menunjukkan bahwa realisasi belanja barang masih di bawah pagu.

2. Belanja Modal: Realisasi sebesar Rp1.981.383.602,- atau sekitar 99,3% dari pagu sebesar Rp1.995.113.000,-. Ini menunjukkan bahwa realisasi belanja modal masih di bawah pagu.

3. Belanja Pegawai: Realisasi sebesar Rp84.976.637.491,- atau sekitar 104,2% dari pagu sebesar Rp81.539.644.000,-. Ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai melebihi pagu.

Kode BA - Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
005 - 402331	PENGADILAN AGAMA KRUI	183.500.000	182.786.375	99,61%
060 - 641923	POLRES LAMPUNG BARAT	44.080.370.000	43.851.205.240	99,48%
076 - 656731	KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT	46.658.148.000	46.449.466.970	99,55%
025 - 547512	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	33.570.158.000	36.452.298.197	108,59%
025 - 547517	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	427.000.000	419.344.086	98,21%
005 - 614883	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	4.008.030.000	3.993.018.191	99,63%
005 - 614884	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	164.350.000	163.871.950	99,71%
025 - 425002	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMPUNG BARAT KAB. LAMPUNG BARAT	983.692.000	982.601.329	99,89%
025 - 597715	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 LAMPUNG BARAT KAB. LAMPUNG BARAT	1.125.601.000	1.125.601.000	100,00%
025 - 547514	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	2.354.347.000	2.263.145.369	96,13%
054 - 552560	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. LAMPUNG BARAT	8.162.425.000	7.498.638.445	91,87%
015 - 634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	1.339.843.000	1.317.633.012	98,34%
056 - 539604	KANTOR PERTANAHAN KAB. LAMPUNG BARAT	4.904.767.000	4.703.560.305	95,90%
005 - 402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	3.292.840.000	3.216.239.713	97,67%
025 - 547519	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	142.438.000	136.314.160	95,70%
025 - 547513	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	2.442.364.000	2.239.801.096	91,71%
006 - 559932	KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT	6.632.515.000	6.908.142.891	104,16%
	TOTAL	**160.472.388.000**	**161.903.668.329**	**100,89%**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mencapai Rp89.384.681.653,- atau sekitar 92,9% dari total pagu sebesar Rp96.173.833.000,-.

KOMPOSISI PAGU APBN KABUPATEN PESISIR BARAT

Realisasi per Jenis Belanja :

1. Belanja Barang: Realisasi sebesar Rp41.048.375.662,- atau sekitar 80,2% dari pagu sebesar Rp51.178.991.000,-. Ini menunjukkan bahwa realisasi belanja barang masih di bawah pagu.

2. Belanja Modal: Realisasi sebesar Rp456.355.526,- atau sekitar 64,8% dari pagu sebesar Rp704.026.000,-. Ini menunjukkan bahwa realisasi belanja modal masih di bawah pagu.

3. Belanja Pegawai: Realisasi sebesar Rp47.879.950.465,- atau sekitar 108,1% dari pagu sebesar Rp44.290.816.000,-. Ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai melebihi pagu.

Kode BA - Satker	Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
025 - 418180	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	794.672.000	794.672.000	100%
025 - 418478	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	456.000.000	456.000.000	100%
025 - 554155	Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesisir Barat	1.736.709.000	1.730.132.921	99,62%
025 - 418408	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	280.538.000	280.538.000	100%
056 - 689405	Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Barat	3.835.981.000	3.652.884.242	95,23%
076 - 121306	KPU Kabupaten Pesisir Barat	33.721.316.000	24.206.078.258	71,78%
013 - 406591	Rumah Tahanan Negara Krui	5.408.627.000	5.341.150.548	98,75%
060 - 970106	Polres Pesisir Barat	27.443.191.000	27.052.305.534	98,58%
025 - 401837	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	1.486.729.000	1.306.299.000	87,86%
006 - 007350	Cabang Kejaksaan Negeri lampung Barat di Krui	3.022.539.000	2.983.016.991	98,69%
025 - 418886	Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat	17.987.531.000	21.581.604.159	119,98%
	TOTAL	**96.173.833.000**	**89.384.681.653**	**92,94%**

PNBP DI WILAYAH KERJA KPPN LIWA

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan sebagai imbalan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, PNBP menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang efektif dan efisien.

Kontribusi PNBP dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia semakin krusial keberadaannya sebagai sumber dana alternatif pengeluaran negara selain perpajakan. Hal ini karena PNBP dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, sehingga dapat membantu membiayai berbagai program pembangunan yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan PNBP harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan, agar dapat memastikan bahwa sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks pengelolaan PNBP, terdapat beberapa sumber pendapatan yang sangat penting, seperti pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), hak negara, dan pelayanan.

1. **Pengelolaan Barang Milik Negara**
   dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui sewa rumah dinas, gedung, maupun tanah, serta bentuk BMN lainnya.
2. **Hak Negara**
   dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui pendapatan administrasi dan penegakan hukum, seperti yang diterapkan di satker Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.
3. **Pelayanan**
   dapat memberikan pendapatan kepada negara melalui layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Kode	Nama Satker	Total
641923	Polres Lampung Barat	3.681.500.000
547513	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	1.005.067.000
401837	Kantor Kementerian Agama Kab Pesisir Barat	451.200.000
539604	Kantor Pertanahan Kab Lampung Barat	404.706.291
970106	Polres Pesisir Barat	318.678.834
559932	Kejaksaan Negeri Lampung Barat	221.122.272
689405	Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat	196.761.343
656731	KPU Kabupaten Lampung Barat	118.515.145
	TOTAL	6.596.806.609

10 JENIS SETORAN PNBP TERTINGGI

1. **425919** - Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
   Rp4.131.311.999,-
2. **425263** - Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
   Rp2.098.000.000,-
3. **425351** - Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
   Rp1.456.200.000,-
4. **425341** - Pendapatan Pelayanan Pertanahan
   Rp572.123.676,-
5. **425261** - Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
   Rp554.080.000,-
6. **425262** - Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
   Rp403.960.000,-
7. **425276** - Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu
   Rp335.000.000,-
8. **425265** - Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
   Rp295.650.000,-
9. **425273** - Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
   Rp233.280.030,-
10. **425131** - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
    Rp154.550.507,-

SEKILAS INFO

Dokumentasi : KPPN Liwa

DANAU SUOH

Kecamatan Suoh, terletak di Lampung Barat, merupakan wilayah yang menyimpan kekayaan alam luar biasa dan mempesona. Daerah ini tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, tetapi juga memiliki potensi panas bumi yang signifikan, sehingga menjadi sumber energi baru yang sangat berpotensi.

Salah satu daya tarik utama Suoh adalah Danau Suoh, yang terdiri dari tiga danau indah yang dipisahkan oleh padang rumput ilalang yang menawan. Pemandangan ini menawarkan keindahan alam yang unik dan menarik bagi pengunjung.

Lokasi Suoh sangat strategis karena berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, salah satu kawasan konservasi terpenting di Sumatera. Selain itu, daerah ini juga memiliki keunikan geologi dengan adanya patahan lempeng tektonik dan Sesar Semangka yang panjang, menawarkan kesempatan unik bagi penelitian ilmiah dan eksplorasi.

TRANSFER KE DAERAH

2 KABUPATEN

247 DESA

5.629 KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

86,65% DARI TOTAL PAGU APBN KPPN LIWA

ALOKASI PAGU LAMPUNG BARAT DAN PESISIR BARAT TAHUN 2024:

Tahun 2024, KPPN Liwa mengalokasikan dana sebesar **Rp1.666 triliun** untuk memperkuat pembangunan di Lampung Barat dan Pesisir Barat. Dari total tersebut, Lampung Barat mendapatkan Rp964 miliar, sedangkan Pesisir Barat Rp702 miliar.

Alokasi terbesar, yakni Rp1,035 triliun, dialokasikan untuk **Dana Transfer Umum (DTU)**, yang akan mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu, DAK Fisik dan Nonfisik masing-masing mendapatkan Rp146,3 miliar dan Rp226 miliar untuk mendukung pembangunan fisik dan nonfisik di kedua kabupaten.

Dana Desa dan Insentif Fiskal sebesar Rp258,2 miliar juga dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kategori	Lampung Barat	Pesisir Barat	Total
DAK Fisik	121.519.087.000	24.788.550.000	146.307.637.000
DAK Non Fisik	139.681.716.000	86.387.000.000	226.068.716.000
Dana Desa & Insentif Fiskal	138.556.473.000	119.677.097.000	258.233.570.000
Dana Transfer Umum	564.345.883.000	471.189.206.000	1.035.535.089.000
Total	964.103.159.000	702.041.853.000	1.666.145.012.000

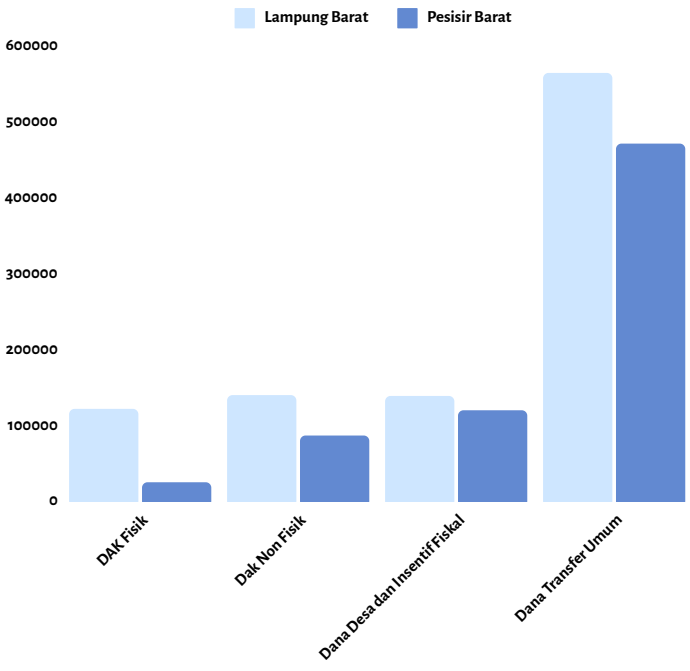

Alokasi dana ini menunjukkan beberapa hal:

1. Prioritas pembangunan adalah infrastruktur dan pelayanan publik.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Dana Desa dan Insentif Fiskal.
3. Pengembangan potensi lokal melalui DAK Fisik dan Nonfisik.
4. Keseimbangan alokasi dana antara Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Pembangunan infrastruktur di **Kabupaten Lampung Barat** menunjukkan kemajuan signifikan, ditandai dengan realisasi DAK Fisik sebesar Rp119,32 miliar atau 98,61% dari pagu. Ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang optimal. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi dan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama, mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pengembangan sektor pariwisata masih belum optimal, dengan realisasi DAK Fisik hanya Rp1,63 miliar atau 67,1% dari pagu. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung.

No	SUB BIDANG	PAGU	REALISASI	%
1	PAUD	896.961.000	894.596.000	99,7
2	SD	6.613.008.000	6.570.203.034	99,3
3	SMP	3.316.148.000	3.306.813.279	99,7
4	PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	5.012.083.000	4.948.937.256	98,8
5	PERPUSTAKAAN	10.183.774.000	10.137.377.300	99,8
6	JALAN	7.747.638.000	7.679.753.000	99,1
7	LINGKUNGAN HIDUP	3.355.207.000	3.343.600.000	99,4
8	PERDAGANGAN	70.000.000.000	69.499.769.000	99,3
9	PENGUATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	512.660.000	469.130.000	91,5
10	JALAN PARIWISATA	8.129.104.000	8.042.376.000	98,9
11	INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	3.321.738.000	3.310.290.277	99,6
12	PARIWISATA	2.430.766.000	1.629.450.640	67,1

Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga ditunjang oleh pengembangan infrastruktur pendidikan. Realisasi DAK Fisik untuk PAUD, SD dan SMP mencapai Rp894,6 juta, Rp6,57 miliar dan Rp3,31 miliar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, perlu ditingkatkan koordinasi antarinstansi dan penggunaan dana yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah.

FISIK PATEN PUNG T DAN R BARAT

KPPN Liwa telah menyalurkan DAK Fisik di **Kabupaten Pesisir Barat** sampai pada Triwulan IV 2024 sebesar Rp24,02 miliar atau 96,88% dari total pagu Rp24,79 miliar. Pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, dengan realisasi DAK Fisik untuk PAUD, SD dan SMP mencapai Rp845,95 juta, Rp3,33 miliar dan Rp2,72 miliar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pengembangan infrastruktur juga menjadi fokus utama, dengan realisasi DAK Fisik untuk jalan mencapai Rp8,99 miliar atau 98,6% dari pagu. Selain itu, penguatan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan stunting juga menunjukkan kemajuan dengan realisasi Rp6,21 miliar. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara pagu dan realisasi pada beberapa subbidang, seperti Penguatan Sistem Kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi pengembangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Perbaikan strategis antara lain, perlu dilakukan peningkatan realisasi DAK Fisik dengan memastikan penyaluran dana tepat waktu dan efektif. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan dan evaluasi rutin serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui pelatihan dan pendidikan juga perlu ditingkatkan.

Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, perlu diperkuat koordinasi antara instansi pemerintah dan stakeholder. Pengembangan pariwisata dan infrastruktur juga perlu menjadi fokus utama. Peningkatan kualitas layanan publik serta penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi juga sangat penting. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan efektif dan optimal. Oleh karena itu, perlu dibuat rencana strategis pembangunan jangka panjang yang mempertimbangkan analisis dan partisipasi masyarakat.

Subbidang PAUD
Pagu : Rp851.984.000,-
Realisasi : Rp845.950.000,-
99,3%

Subbidang SD
Pagu : Rp3.353.992.000,-
Realisasi : Rp3.329.991.560,-
99,3%

Subbidang SMP
Pagu : Rp2.736.670.000,-
Realisasi : Rp2.724.985.720,-
99,6%

Penguatan Kesehatan Ibu dan Anak
Pagu : Rp6.751.655.000,-
Realisasi : Rp6.215.001.703,-
92,1%

Penguatan Sistem Kesehatan
Pagu : Rp2.006.580.000,-
Realisasi : Rp1.904.430.000,-
94,9%

Subbidang Jalan
Pagu : Rp9.087.669.000,-
Realisasi : Rp8.995.366.124,-
98,9%

LAPORAN INFLASI KAB. LAMPUNG BARAT & PESISIR BARAT

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus. Ini merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga stabilitas ekonomi menjadi terancam. Inflasi harus dikendalikan untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan dengan baik. Pemerintah menargetkan tingkat inflasi pada tahun 2024 berada di rentang 2,8%. Untuk mencapai target ini, pemerintah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui dukungan belanja negara, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

KPPN Liwa selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi dengan menghadiri rapat rutin bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan tim pusat dalam membahas pengendalian inflasi daerah secara nasional yang dilaksanakan secara daring di tingkat nasional dan luring dari ruang media center pemda Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan Nota Dinas Kepala KPPN Liwa nomor ND-710/KPN.0804/2024 tanggal 27 Agustus 2024 hal Jadwal Pelaksanaan Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

- **Belanja K/L Tertagging Inflasi**

Pada akhir triwulan IV Tahun 2024, Inflasi pada Provinsi Lampung sebesar 1,57 persen. Jika dilihat tren antara inflasi (m-to-m) dengan belanja K/L terkait penanganan inflasi per kapita bulanan di wilayah kerja KPPN liwa terlihat bahwa pada triwulan keempat terjadi kenaikan realisasi belanja secara konsisten mulai dari periode bulan Oktober s.d. Desember 2024. Sedangkan tingkat inflasi Provinsi Lampung bergerak secara fluktuatif selama triwulan IV, yaitu mengalami penurunan pada bulan November dan kembali naik pada bulan Desember 2024, sebagaimana grafik berikut:

- **Belanja DAK Fisik dalam Rangka Pengendalian Inflasi**

Total Pagu DAK Fisik ter-tagging sebesar Rp146.307.637.000 dengan rincian pagu Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp121.519.087.000 sedangkan total pagu Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp24.788.550.000. Pagu DAK Fisik Kabupaten Lampung Barat tersebut terdiri dari 2 (dua) kategori intervensi yaitu Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi dan 4 (empat) Kelompok Pegeluaran yaitu Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan Rekreasi. Sementara itu, untuk pagu DAK Fisik Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari dari 2 (dua) kategori intervensi yaitu Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi dan 3 (tiga) Kelompok Pegeluaran yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Transportasi sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Intervensi/Kelompok Pengeluaran	Pagu	Total Realisasi	% Total Realisasi
Kabupaten Lampung Barat				
	K1-Keterjangkauan Harga	26.534.634.000	26.327.056.869	99,22%
1	Pendidikan	21.009.891.000	20.908.989.613	99,52%
2	Kesehatan	5.524.743.000	5.418.067.256	98,07%
	K3-Kelancaran Distribusi	94.984.453.000	93.505.238.917	98,44%
1	Transportasi	15.876.742.000	15.876.742.000	99,03%
2	Rekreasi	79.107.711.000	79.107.711.000	98,33%
Total		**121.519.087.000**	**119.832.295.786**	**98,61%**
Kabupaten Pesisir Barat				
	K1-Keterjangkauan Harga	15.700.881.000	15.020.358.983	95,67%
1	Pendidikan	6.900.927.280	5.255.906.079	99,40%
2	Kesehatan	8.119.431.703	2.975.948.050	92,71%
	K3-Kelancaran Distribusi	8.995.366.124	2.271.917.250	98,98%
1	Transportasi	8.995.366.124	2.271.917.250	98,98%
Total		**24.788.550.000**	**24.015.725.107**	**96,88%**

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan inflasi di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat pada triwulan IV tahun 2024 yaitu:

1. Fluktuasi harga pangan menjelang akhir tahun dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru dapat memicu kenaikan harga.
2. Kenaikan harga bahan bakar baik karena perubahan harga minyak dunia maupun kebijakan pemerintah terkait subsidi energi
3. Adanya spekulasi masyarakat terhadap harga komoditas pokok di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat dapat menjadi faktor terjadinya inflasi.

Berdasarkan kendala di atas, beberapa **rekomendasi** yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut yaitu:

1. Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga barang dan jasa dengan cara menggelar operasi pasar murah untuk menjual barang pokok dengan harga terjangkau di lokasi strategis.
2. Perlu adanya penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait termasuk Kementerian Keuangan untuk memastikan stabilitas harga di tiap-tiap daerah.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa.
4. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi.
5. Pemerintah daerah dapat meningkatan sistem pengumpulan data yang akurat dan terkini mengenai inflasi dan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat dapat lebih efektif dalam menanggulangi inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di wilayahnya masing-masing.

DAK NON FISIK KAB. LAMPUNG BARAT DAN PESISIR BARAT

Pembangunan **Kabupaten Lampung Barat** menunjukkan kemajuan signifikan melalui penyaluran DAK Nonfisik yang efektif. Dengan realisasi sebesar **99,8%** dari total pagu Rp139,681,716,000, menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Pengembangan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, dengan alokasi dana BOSP sebesar Rp43,265,885,160 dan Dana Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp65,297,080,000.

Namun, beberapa tantangan perlu diatasi, seperti keterlambatan penyaluran dana, pengawasan dan evaluasi yang kurang efektif, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan strategis, seperti perkuat koordinasi antarinstansi, pengembangan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, perlu dibuat rencana strategis jangka panjang yang mempertimbangkan analisis dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan dana. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan efektif dan optimal.

Dana BOSP 99,6%
Pagu :
Rp43.431.820.000 ,-
Realisasi :
Rp43.265.885.160,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah 100%
Pagu :
Rp65.297.080.000,-
Realisasi :
Rp65.297.080.000,-

Dana BOK 99,3%
Pagu :
Rp21.953.346.000,-
Realisasi :
Rp21.808.294.758,-

DAK Nonfisik Lainnya 100%
Pagu :
Rp8.999.470.000,-
Realisasi :
Rp8.999.470.000,-

PAGU PER DETAIL JENIS DAK NON FISIK

Dana BOSP :
BOS : Rp39.257.350.000,-
BOP PAUD : Rp3.021.330.000,-
BOP Kesetaraan : Rp1.153.140.000,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah:
TPG ASN Daerah : Rp63.856.385.000,-
Tamsil Guru ASN Daerah : Rp1.119.518.000,-
TKG ASN Daerah : Rp321.177.000,-

Dana BOK:
BOK Dinas : Rp7.195.968.000,-
BOK Puskesmas : Rp14.757.378.000,-

DAK Nonfisik Lainnya:
Selain Dana BOSP, Tunjangan Guru ASN Daerah, dan BOK yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Rp8.999.470.000,-

Dana BOSP 99,6%
Pagu : Rp28.406.530.000,-
Realisasi : Rp28.360.548.600,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah 100%
Pagu : Rp40.390.466.000,-
Realisasi : Rp40.390.466.000,-

DAK Nonfisik Lainnya 100%
Pagu : Rp4.479.636.000 ,-
Realisasi : Rp4.479.636.000,-

Dana BOK 88,6%
Pagu : Rp13.110.368.000 ,-
Realisasi : Rp11.611.053.402,-

Dana BOSP **Kabupaten Pesisir Barat** memiliki pagu sebesar Rp28.406.530.000 dan realisasi sebesar Rp28.360.548.600 menunjukkan bahwa realisasi Dana BOSP mencapai 99,7% dari pagu, yang menandakan bahwa pengelolaan dana ini relatif efektif.

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah memiliki pagu sebesar Rp40.390.466.000 dan realisasi sebesar Rp40.390.466.000 menunjukkan bahwa realisasi Dana Tunjangan Guru ASN Daerah mencapai 100% dari pagu, yang menandakan bahwa pengelolaan dana ini sangat efektif.

DAK Nonfisik Lainnya memiliki pagu sebesar Rp4.479.636.000 dan realisasi sebesar Rp4.479.636.000 menunjukkan bahwa realisasi DAK Nonfisik Lainnya mencapai 100% dari pagu, yang menandakan bahwa pengelolaan dana ini sangat efektif.

Dana BOK memiliki pagu sebesar Rp13.110.368.000 dan realisasi sebesar Rp11.611.053.402 menunjukkan bahwa realisasi Dana BOK mencapai 88,5% dari pagu, yang menandakan bahwa pengelolaan dana ini masih perlu ditingkatkan.

Dalam keseluruhan, data DAK Nonfisik Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan bahwa pengelolaan dana relatif efektif, terutama untuk Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, dan DAK Nonfisik Lainnya. Namun, pengelolaan Dana BOK masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari setiap jenis DAK Nonfisik tersebut, Pagu Kabupaten Pesisir Barat terbagi lagi menjadi:

Dana BOSP :
BOS : Rp25.979.270.000,-
BOP PAUD : Rp2.141.700.000,-
BOP Kesetaraan : Rp285.560.000,-

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah:
TPG ASN Daerah : Rp34.609.851.000,-
Tamsil Guru ASN Daerah : Rp2.646.000.000,-
TKG ASN Daerah : Rp3.134.615.000,-

Dana BOK:
BOK Dinas : Rp4.117.461.000 ,-
BOK Puskesmas : Rp8.992.907.000,-

DAK Nonfisik Lainnya:
Rp4.479.636.000,-

"Knowledge is Power, Embrace Education"
– @kppnliwa –

DANA DESA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN PESISIR BARAT

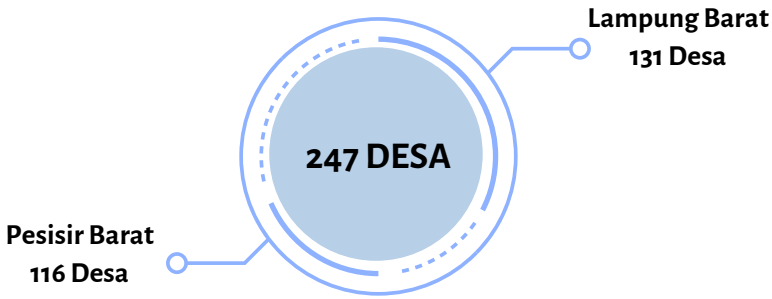

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, realisasi pagu Dana Desa *Non-Earmark* pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat adalah sebesar Rp110,94 miliar yaitu mencapai 88,72 persen dari total pagu sebesar Rp125,04.

Alokasi Pagu per Tahap Dana Desa *Non-Earmark* s.d. Triwulan IV 2024

1

Lampung Barat		Pesisir Barat	
Pagu	**Realisasi**	**Pagu**	**Realisasi**
33.021.006.200	33.021.006.200	22.844.074.800	22.844.074.800

2

Lampung Barat		Pesisir Barat	
Pagu	**Realisasi**	**Pagu**	**Realisasi**
35.672.369.800	35.672.369.800	33.508.363.200	33.508.363.200

Alokasi Pagu per Tahap Dana Desa *Earmark* s.d. Triwulan IV 2024

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, realisasi pagu Dana Desa *Earmark* pada Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat adalah sebesar Rp75,07 miliar yaitu mencapai 90,68 persen dari total pagu sebesar Rp82,79.

1

Lampung Barat		Pesisir Barat	
Pagu	**Realisasi**	**Pagu**	**Realisasi**
27.512.656.200	27.512.656.200	22.163.434.800	22.163.434.800

2

Lampung Barat		Pesisir Barat	
Pagu	**Realisasi**	**Pagu**	**Realisasi**
18.341.770.800	18.341.770.800	14.775.623.200	14.775.623.200

Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal

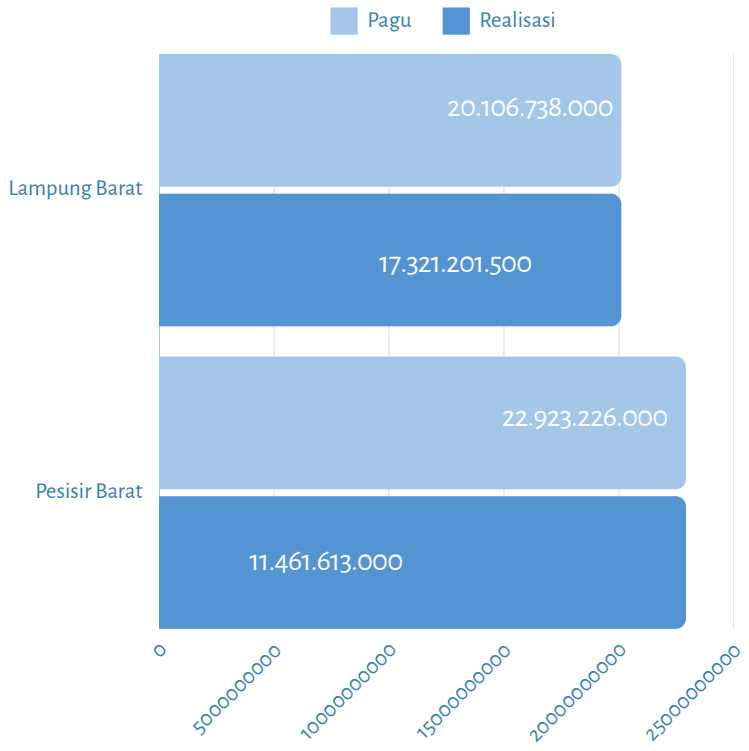

Berdasarkan KMK 352 Tahun 2024 tanggal 1 September 2024 terdapat tambahan Dana Desa sebesar Rp7.364.307.000,- untuk masing-masing kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat senilai Rp3.901.932.000,- dan Rp3.462.375.000.

REALISASI DANA TRANSFER UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Komposisi alokasi pagu Dana Transfer Umum di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp564,35 miliar.

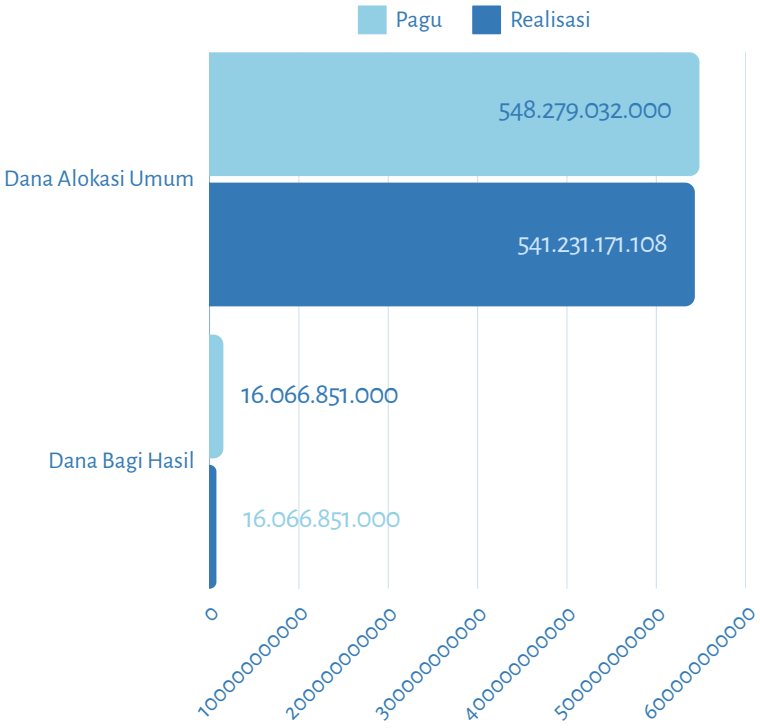

Realisasi DTU pada Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Triwulan IV 2024 mencapai sebesar Rp557,29 miliar atau 98,1 persen dari total pagu.

Dari setiap jenis DTU tersebut pada Kabupaten Lampung Barat terbagi lagi menjadi:

Dana Alokasi Umum:

BG : Rp434.843.839.000,-

Formasi PPK : Rp14.657.049.000,-

Kelurahan : Rp1.000.000.000,-

Pendidikan : Rp46.169.037.000,-

Kesehatan : Rp29.483.685.000,-

PU : Rp16.969.646.000,-

DAU Tambahan : Rp5.155.776.000,-

Dana Bagi Hasil:

- PPh Pasal 21 : Rp3.821.767.000,-
- PPh Pasal 25/29 : Rp161.526.000,-
- PBB : Rp1.556.418.000,-
- SDA Minyak Bumi : Rp2.904.457.000,-
- SDA Minerba : Rp113.350.000,-
- SDA Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah : Rp1.792.125.000,-
- SDA Panas Bumi-Iuran Tetap : Rp48.936.000,-
- SDA Kehutanan : Rp151.447.000,-
- SDA Perikanan : Rp1.097.155.000,-
- CHT : Rp126.210.000,-
- Sawit : Rp3.679.357.000,-
- DBH Kurang Bayar : Rp614.103.000,-

REALISASI DANA TRANSFER UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Komposisi alokasi pagu Dana Transfer Umum di **Kabupaten Pesisir Barat** sampai dengan Triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp471,19 miliar.

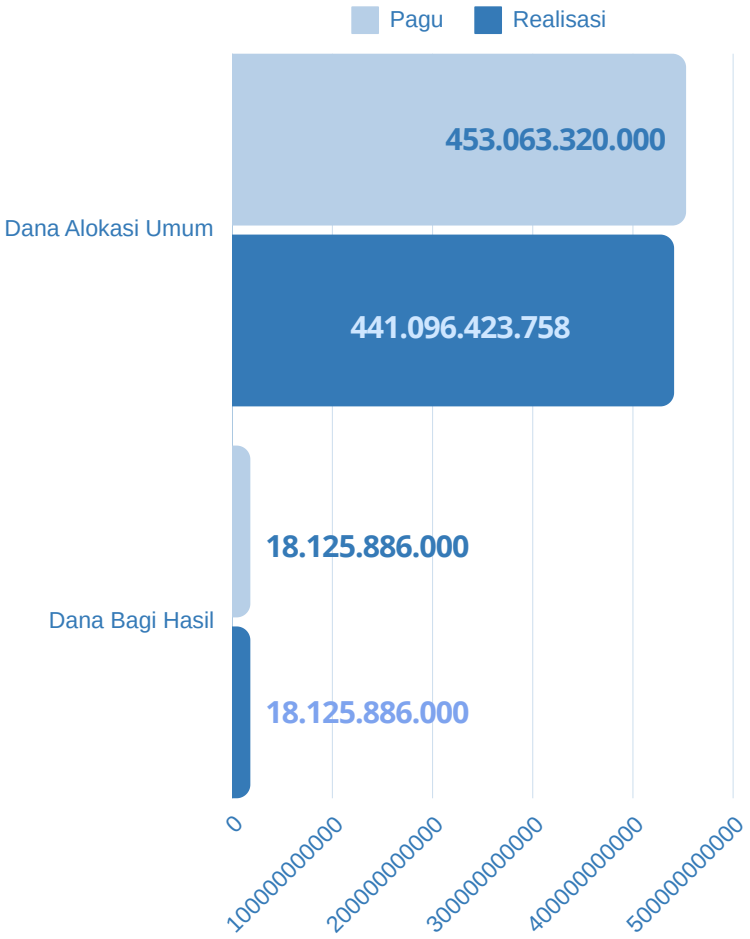

Realisasi DTU pada **Kabupaten Pesisir Barat** sampai dengan Triwulan IV 2024 mencapai sebesar Rp459,22 miliar atau 97,46 persen dari total pagu.

Dari setiap jenis DTU tersebut pada Kabupaten Pesisir Barat terbagi lagi menjadi:

Dana Alokasi Umum:

- BG : Rp313.193.895.000,-
- Formasi PPK : Rp23.561.775.000,-
- Kelurahan : Rp400.000.000,-
- Pendidikan : Rp52.771.715.000,-
- Kesehatan : Rp29.569.281.000,-
- PU : Rp27.368.216.000,-
- DAU Tambahan : Rp6.198.438.000,-

Dana Bagi Hasil:

- PPh Pasal 21 : Rp3.184.334.000,-
- PPh Pasal 25/29 : Rp137.774.000,-
- PBB : Rp1.722.088.000 ,-
- SDA Minyak Bumi : Rp3.028.051.000,-
- SDA Minerba : Rp1.598.000,-
- SDA Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah : Rp1.863.539.000,-
- SDA Panas Bumi-Iuran Tetap : Rp6.718.000,-
- SDA Kehutanan : Rp48.511.000,-
- SDA Perikanan : Rp2.353.639.000,-
- CHT : Rp127.060.000,-
- Sawit : Rp5.074.579.000,-
- DBH Kurang Bayar : Rp577.995.000,-

"PERAN GEN Z DI ERA SOCIETY 5.0"

Penulis : Indah R. Wulandari & Citra Maharani

Istilah Gen Z tentunya sudah tidak asing di kalangan masyarakat, terutama dalam dunia kerja. Survei yang dilakukan oleh Resume Builder menyebutkan bahwa Gen Z dikenal memiliki persepsi negatif di masyarakat sebagai generasi yang kurang memiliki etos kerja, terlalu fokus terhadap keseimbangan hidup-kerja dan kesehatan mental yang dianggap menurunkan produktifitas dalam bekerja, sensitif terhadap kritik, kurangnya keterampilan interpersonal dan persepsi negatif lainnya yang disematkan terhadap Gen Z.

Terlepas dari persepsi negatif terhadap Gen Z di masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh Arum, dkk (2023) menyatakan bahwa Gen Z merupakan generasi yang mahir dalam penguasaan teknologi informasi, memiliki intelektual yang baik, terbuka (*open minded*), *multitasking* dan sangat peduli dengan isu-isu sosial .

Berdasarkan teori pengelompokan generasi dan penelitian yang dilakukan oleh Bencsik dan Machova (2016), suatu generasi dapat dikelompokkan berdasarkan rentang waktu kelahiran dengan pengelompokan sebagai berikut:

No	Genereasi	Tahun Kelahiran	Karakter
1	Baby Boomer	1946-1964	Disiplin tinggi, memiliki mental dan prinsip yang kuar, loyal, berdedikasi, sulit menerima kritik
2	Generasi X	1965-1980	Disiplin, pekerja keras, logis, mandiri, menyukai sesuatu yang tidak formal, membutuhkan validasi secara emosional
3	Generasi Y	1981-1995	Percaya diri, terbuka menerima perubahan, berpikir out of the box, ambisius, rentan mengalami stress dan depresi
4	Generasi Z	1996-2010	Mahir dalam teknologi, intelektual tinggi, open minded, multitasking, fokus terhadap work life balance, keras kepala dan terburu-buru dan sensitif terhadap kritik
5	Generasi Alpha	2011-2024	Mahir dalam teknologi, cerdas, inovatif, tidak suka dibatasi oleh aturan
6	Generasi Betha	2025-seterusnya	-

Data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik berdasarkan Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa komposisi masyarakat Indonesia saat ini didominasi oleh Gen Z denganjumlah 71,51 juta jiwa atau mencapai 27% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.

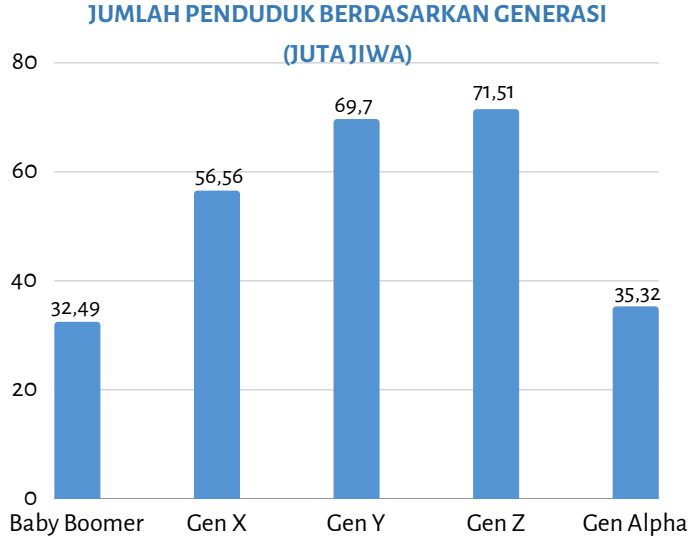

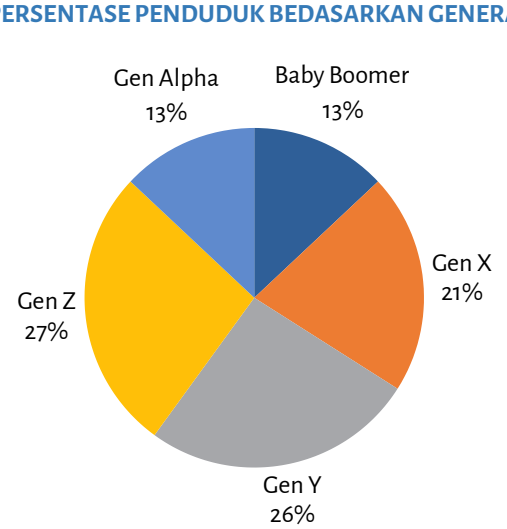

Dengan komposisi demografi saat ini, Badan Pusat Statistik memproyeksikan Indonesia berada pada puncak bonus demografi pada periode 2020-2030. Bonus demografi merupakan kondisi dimana usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non-produktif yang berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan di Indonesia, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sektor kehidupan lainnya. Komposisi penduduk yang didominasi oleh Gen Z akan menempatkan Gen Z pada posisi yang strategis dan memiliki peran yang signifikan dalam menjalani **Era Society 5.0**.

Era Society 5.0 menurut Japan Cabinet Office merupakan era dimana teknologi seperti kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*), Internet of Things, dan penggunaan big data digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan masalah sosial sehingga dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Era Society 5.0 mengusung konsep "*A human- centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space*", yaitu menempatkan masyarakat yang berpusat pada manusia demi menyeimbangkan kemajuan ekonomi melalui penyelesaian berbagai masalah sosial dengan sistem yang saling berintegrasi yakni ruang siber dan ruang fisik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016), penggunaan teknologi yang tinggi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta isu-isu sosial di Era Society 5.0 memiliki hubungan yang erat dengan karakteristik Gen Z, yang dikenal sebagai IGeneration atau Generasi Internet, dimana generasi ini terlahir ketika teknologi sudah mengalami kemajuan yang pesat dan tumbuh dengan penggunaan internet,smartphone, dan laptop dalam keseharian sehingga dapat menggunakan teknologi tersebut dengan sangat baik.

Karakter Gen Z yang terbuka (open minded), multitasking dan sangat peduli dengan isu-isu sosial akan mampu mendorong terciptanya inovasi yang kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Saat ini, Gen Z telah memasuki usia produktif, turut berperan nyata dalam tatanan kehidupan masyarakat dan memiliki kontribusi terhadap negeri. Gen Z akan menjadi agen perubahan pembangunan dan penggerak inovasi serta potensi besar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Gen Z mencapai 380.512 pegawai atau 8% dari total ASN (data periode semester I tahun 2024). Gen Z yang mengabdikan dirinya sebagai ASN baik ASN Pusat maupun ASN Daerah berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di seluruh pelosok Indonesia. Gen Z yang berprofesi sebagai polisi, TNI, dan aparatur hukum akanmenciptakan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum di Indonesia menjadi lebih baik. Para akademisi, guru, mahasiswa dan pelajar juga memiliki kontribusi dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Pada sektor investasi, mengutip data PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) jumlah Gen Z yang menjadi investor mencapai 56,4% dari total investor individu. Hal ini menunjukan bahwa Gen Z turut berpartisipasi dalam dinamika investasi di Indonesia. Kemampuan Gen Z dalam menggunakan teknologi akan mendorong kemajuan teknologi yang pesat di Indonesia.Pengusaha muda, content creator dan pegawai swasta akan menciptakan ekonomi kreatif dan membuka lapangan pekerjaan mandiri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Potensi dan kontribusi dari Gen Z di berbagai bidang akan menjadi harapan dan menjawab tantangan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Persepsi negatif terhadap Gen Z saat ini, harus ditanggapi dengan bijak dengan meningkatkan kompetensi, baik hard skill maupun soft skill dan juga meningkatkan value diri yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Gen Z harus menunjukkan etos kerja yang baik, berintegritas, berdedikasi dan penuh ide-ide kreatif dan inovasi serta didukung dengan perilaku dan attitude yang baik.

Di tahun 2025 ini, mari bersama-sama kita menularkan semangat untuk mengisi Era Society 5.0 dengan berinovasi dan memberikan perubahan yang bermakna bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMI)

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program fasilitas pembiayaan yang cepat dan mudah untuk usaha ultra mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah.

UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp20 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain:

- PT Pegadaian (Persero)
- PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
- PT Bahana Artha Ventura

Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Kabupaten	Nama Penyalur	Total Debitur	Total Penyaluran
Lampung Barat	Permodalan Nasional Madani	461	Rp2.877.000.000,-
	Pegadaian	1	Rp15.000.000,-
	PT Bahana Artha Ventura	3	Rp21.000.000,-
Pesisir Barat	Permodalan Nasional Madani	373	Rp2.529.000.000,-
Total		838	Rp5.442.000.000,-

Hari Oeang RI ke-78

KPPN Liwa

Periode
Oktober- Desember

High Level Meeting Pemerintah Kab. Pesisir Barat

Penghargaan Koordinasi-Kabupaten Pesisir Barat

Sosialisasi SIMAN Versi 2

Monev SDM

Kemenkeu Mengajar 9 - SMPN 1 Krui

Co-Location Satu Kemenkeu KPKNL dan KP2KP

FGD Digitalisasi Pembayaran

Pemberdayaan UMKM

Capacity Building Triwulan IV

Sharing Session-Hari Antikorupsi Sedunia

SEKINCAU

SEKINCAU